



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS HASANUDDIN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **SONNY TEDDY LISAL**
2. Jabatan : **KETUA DEPARTEMEN ILMU KEDOKTERAN JIWA**
3. NHK : **898789**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 27.250.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/54 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 125 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 3.500.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 2.946 m2/35 m2 di KAB / KOTA GOWA, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 325 m2/210 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASAR BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000.000
6. Tanah Seluas 484 m2 di KAB / KOTA KOTA MAKASSAR , HASIL SENDIRI Rp. 9.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 1.040.000.000**

1. MOTOR, HONDA CBR 250 RR Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
2. MOBIL, HONDA ACCORD Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
3. MOBIL, HONDA CRV Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000



4. MOBIL, TOYOTA CALYA Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
100.000.000
5. MOBIL, TOYOTA KIJANG INNOVA Tahun 2022, HASIL SENDIRI
Rp. 280.000.000
6. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
450.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	3.000.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	6.987.135.999
F. HARTA LAINNYA	Rp.	2.170.000.000
Sub Total	Rp.	40.447.135.999
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	40.447.135.999

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.